

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah melalui laman Publikasmasda di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut dianalisis menggunakan kerangka Digital Governance yang dikemukakan oleh Lisa Welchman, yang terdiri atas tiga indikator utama, yaitu Digital Strategy (Strategi Digital), Digital Policy (Kebijakan Digital), dan Digital Standard (Standar Digital). Ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang saling berkaitan dan bersifat sistemik dalam pengelolaan aspirasi.

Pada aspek Digital Strategy, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya perencanaan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan Publikasmasda. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola sistem digital, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan sistem, khususnya pada tahap penginputan data aspirasi. Selain itu, belum adanya arah strategis jangka panjang yang jelas menyebabkan implementasi Publikasmasda belum terfokus pada pencapaian tujuan kinerja yang terukur. Kondisi ini mengakibatkan prinsip-

prinsip pengelolaan aspirasi berbasis digital belum dapat diterapkan secara optimal.

Pada aspek Digital Policy, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjadi pedoman operasional yang efektif. Hal ini terlihat dari belum diperbaruinya regulasi, belum adanya mekanisme analisis dan sanksi yang jelas, serta belum terpenuhinya karakteristik kebijakan digital yang kontekstual, inklusif, realistis, dapat ditegakkan, berbasis bukti, dan komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan belum mampu mengarahkan proses pengelolaan aspirasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada aspek Digital Standard, meskipun telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA), implementasinya belum berjalan secara konsisten. Standar yang diterapkan masih cenderung berorientasi administratif, sementara fungsi pengendalian kualitas belum optimal. Selain itu, adanya pembatasan teknis dalam sistem turut berdampak pada berkurangnya substansi aspirasi yang dapat diakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa standar digital belum sepenuhnya mampu menjamin kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan pengelolaan aspirasi.

Keterkaitan antar indikator *Digital Governance* menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak bersifat parsial, melainkan saling memengaruhi. Kelemahan pada aspek strategi berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan, sementara kebijakan yang belum optimal turut

memengaruhi penerapan standar. Ketidaksinergian antara Digital Strategy, Digital Policy, dan Digital Standard menyebabkan tata kelola aspirasi melalui Publikasmasda belum mampu berjalan secara efektif dan masih didominasi oleh pendekatan administratif, serta belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan substantif pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah.

Jika ditinjau secara historis, sebelum adanya Publikasmasda, tata kelola aspirasi dilakukan secara konvensional melalui laporan reses tertulis, surat menyurat, dan pengarsipan manual. Sistem tersebut memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, transparansi, serta tidak adanya mekanisme monitoring yang terintegrasi. Kehadiran Publikasmasda menjadi langkah transformasi digital yang memberikan perbaikan pada aspek pencatatan dan dokumentasi aspirasi secara lebih terstruktur.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Publikasmasda belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas tata kelola aspirasi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan data antarprovinsi, belum optimalnya partisipasi dalam penginputan data, serta terbatasnya kualitas dan kelengkapan data aspirasi yang dihasilkan. Sistem masih cenderung berfungsi sebagai alat dokumentasi administratif, belum sepenuhnya sebagai instrumen pengelolaan aspirasi yang komprehensif.

Apabila dilihat dari alur pengelolaan aspirasi, proses tersebut seharusnya berjalan secara berkesinambungan mulai dari tahap penyerapan, penginputan, pengolahan dan analisis, hingga pemanfaatan dalam fungsi kelembagaan. Kualitas keseluruhan proses sangat ditentukan oleh tahap awal, yaitu input dan tabulasi data aspirasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada tahap input dan tabulasi, di mana proses penginputan belum optimal dan data yang dihasilkan masih bersifat administratif serta belum sepenuhnya mencerminkan substansi aspirasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut.



Gambar 5. 1. Tahap Kegagalan pada alur pengelolaan aspirasi melalui Publikasmasda

Sumber : Publikasmasda, diolah kembali, 2026

Permasalahan pada tahap input dan tabulasi berdampak pada tahapan selanjutnya, seperti analisis, penelusuran kebijakan (policy tracing), dan tindak lanjut aspirasi yang menjadi tidak optimal. Dengan demikian, meskipun sistem telah dirancang untuk mendukung pengelolaan aspirasi secara terintegrasi, kualitas output tetap sangat bergantung pada kualitas input data yang dimasukkan ke dalam sistem. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya Publikasmasda, terdapat pergeseran karakteristik permasalahan. Pada sistem konvensional, kendala utama terletak pada

keterbatasan administratif dan teknis. Sementara itu, setelah adanya Publikasmasda, kendala tersebut secara teknis telah berkurang, namun muncul permasalahan baru yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sistem, khususnya pada tahap input dan pengelolaan tabulasi data. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan dalam aspek implementasi, baik dari sisi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, maupun mekanisme pengendalian kualitas data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah melalui Publikasmasda sangat ditentukan oleh perbaikan pada tahap input dan tabulasi data, serta penguatan secara terintegrasi pada aspek Digital Strategy, Digital Policy, dan Digital Standard.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi penting terhadap tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah di lingkungan DPD RIPertama, secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kerangka Digital Governance yang mencakup Digital Strategy, Digital Policy, dan Digital Standard belum berjalan secara terintegrasi, sehingga memperkuat temuan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada keselarasan antara strategi, kebijakan, dan standar yang mendukungnya.

Kedua, secara praktis, penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan Publikasmasda belum sepenuhnya mampu meningkatkan

kualitas pengelolaan aspirasi secara substantif. Sistem masih berfungsi dominan sebagai alat dokumentasi administratif, sehingga belum mampu mendukung proses analisis, monitoring, dan tindak lanjut aspirasi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan aspirasi dalam mendukung fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan DPD RI.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada tahap input dan tabulasi data aspirasi. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa kualitas keseluruhan tata kelola aspirasi sangat bergantung pada kualitas data awal yang dimasukkan ke dalam sistem. Ketidaktertiban, ketidaklengkapan, dan ketidakkonsistenan data pada tahap awal akan berdampak pada lemahnya proses analisis kebijakan dan tindak lanjut aspirasi.

Keempat, secara kelembagaan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transformasi digital yang dilakukan melalui Publikasmasda belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, serta mekanisme pengendalian kualitas yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengembangan sistem digital dengan kapasitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk meningkatkan optimalisasi tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah melalui Publikasmasda adalah sebagai berikut:

Pertama, pada aspek *Digital Strategy*, perlu dilakukan penguatan perencanaan strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyusunan roadmap pengembangan Publikasmasda, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendampingan, serta penetapan target kinerja yang terukur dalam pengelolaan aspirasi berbasis digital. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan partisipasi anggota DPD RI dalam penginputan data melalui pendekatan insentif maupun penguatan komitmen kelembagaan.

Kedua, pada aspek *Digital Policy*, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan aspirasi berbasis digital. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme analisis, monitoring, serta sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan sistem. Selain itu, kebijakan yang disusun harus bersifat kontekstual, realistis, dan berbasis kebutuhan lapangan agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketiga, pada aspek *Digital Standard*, perlu dilakukan penyempurnaan dan penegakan standar operasional yang lebih konsisten. Hal ini meliputi penguatan SOP dan SLA yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mengatur kualitas data, kelengkapan informasi, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi. Selain itu, diperlukan pengembangan fitur sistem yang mendukung monitoring dan tracking aspirasi secara berkelanjutan, sehingga setiap aspirasi dapat ditelusuri progresnya.

Keempat, secara teknis, perlu dilakukan perbaikan pada tahap input dan tabulasi data sebagai titik kritis dalam pengelolaan aspirasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan format input, standarisasi variabel data, serta penerapan sistem validasi otomatis untuk meningkatkan kualitas data yang masuk. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan.

Kelima, diperlukan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara terintegrasi dalam sistem Publikasmasda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspirasi tidak hanya tercatat, tetapi juga ditindaklanjuti secara jelas dan terukur. Sistem monitoring ini juga dapat menjadi alat evaluasi kinerja dalam pengelolaan aspirasi di lingkungan DPD RI.

Dengan demikian, implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi tata kelola aspirasi masyarakat dan daerah melalui Publikasmasda, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sistem dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.